

## Kontribusi faktor sosioekonomi pada kemiskinan di Pulau Jawa

Meita Indah Fadilla, Dini Hariyanti\*  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia

\* Korespondensi (e-mail: [dinihariyanti@trisakti.ac.id](mailto:dinihariyanti@trisakti.ac.id))

### Abstract

Poverty is a social problem hindering a country's economic progress. This problem has spread widely and is increasingly complex throughout Indonesia, especially in Java Island, which has the fastest population growth and slow socio-economic development due to ongoing poverty. This research investigates the factors that influence poverty on Java Island in 2022. Using cross-section data from 119 districts/cities in Java Island and multiple linear regression analysis, this research measures poverty through the human development index, open unemployment rate, and minimum wage. The research results show that the open unemployment rate does not significantly affect poverty. In contrast, the human development index and regency/city minimum wages significantly negatively affect poverty. These findings suggest that improving human development in education, health, and decent living conditions is essential. In addition, the government needs to increase efforts in each region to tackle poverty effectively.

Keywords: Human Development Index, Open Unemployment Rate, Poverty, Regency/City Minimum Wage

### Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menghambat kemajuan perekonomian suatu negara. Masalah ini telah menyebar luas dan semakin kompleks di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang memiliki pertumbuhan penduduk tercepat dan pembangunan sosial-ekonomi yang lambat akibat kemiskinan yang terus berlanjut. Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan data cross-section dari 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan analisis regresi linear berganda untuk mengukur kemiskinan melalui indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa, sedangkan indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menyarankan bahwa peningkatan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak sangat penting. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya di setiap wilayah untuk mengatasi kemiskinan secara efektif.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

How to cite: Fadilla, M. I., & Hariyanti, D. (2024). Kontribusi faktor sosioekonomi pada kemiskinan di Pulau Jawa. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 159–172. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.979>

## 1. Pendahuluan

Sebuah negara berusaha mencapai pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan negaranya. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, tentunya tidak mudah bagi suatu negara. Ada beberapa permasalahan yang dianggap sangat



sulit untuk diatasi dan menjadi pokok tujuan yang harus diselesaikan oleh suatu negara. Salah satu permasalahan sosial ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah kemiskinan. Seseorang dapat dianggap miskin apabila seseorang sering bergelut dengan gizi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat melek huruf yang rendah atau tidak memiliki kemampuan sama sekali, tinggal di lingkungan yang miskin, kurang terwakili dalam politik, dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja di usaha kecil-kecilan, pertanian marginal atau di daerah kumuh (Todaro & Smith, 2011).

Kemiskinan menjadi salah satu tugas pemerintah yang wajib diperhatikan untuk menciptakan pembangunan dari segala aspek suatu tata negara agar pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Adanya kemiskinan mendeskripsikan bahwa suatu negara belum dapat memberikan kemakmuran untuk rakyatnya dalam menciptakan pengurangan ketimpangan yang terjadi (Puspita, 2015). Kemiskinan memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi pada suatu negara karena dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah permasalahan kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi terbesar di dunia dimana pulau ini memberikan gambaran secara kompleks terhadap suatu pembangunan (Wulandari & Aisyah, 2021). Adanya laju pertumbuhan penduduk yang terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Pulau Jawa, menjadikan pulau ini menciptakan adanya gambaran paradoks yang beragam dengan segala ketimpangan sosial seperti kemiskinan.

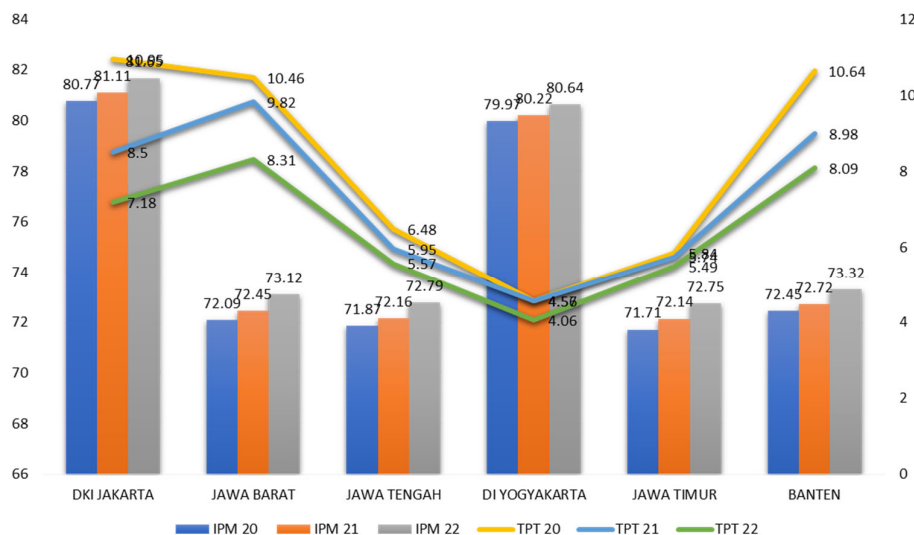
Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin (P0) di Pulau Jawa Tahun 2020-2022

No.	Provinsi di Pulau Jawa	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	DKI Jakarta	4,69	4,67	4,61
2.	Jawa Barat	8,43	7,97	7,98
3.	Jawa Timur	11,46	10,59	10,49
4.	Jawa Tengah	11,84	11,25	10,98
5.	DI Yogyakarta	12,80	11,91	11,49
6.	Banten	6,63	6,50	6,24

Sumber: Data diolah, BPS (2024)

Dilansir dalam laman BPS (2024), persentase penduduk miskin (P0) yang dicapai pada semester 2 tahun 2022 menurut provinsi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta mencapai 4,61%, Jawa Barat mencapai 7,98%, Jawa Tengah mencapai 10,98%, DI Yogyakarta mencapai 11,49%, Jawa Timur mencapai 10,49% dan Banten mencapai 6,24%. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin (P0) diperoleh dari persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Aspek garis kemiskinan menggambarkan nilai rupiah pengeluaran yang minimum dimana diperoleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan baik kebutuhan makanan maupun non makanan (Megawati & Sebayang, 2018). Selain itu, persentase penduduk miskin (P0) dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Banten mengalami penurunan angka persentase penduduk miskin dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sedangkan, Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2021 dan kenaikan 0,01%

di tahun 2022. Perolehan ini merupakan suatu tanda dimana pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kemiskinan pada saat Pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021 dan pemulihan Pandemi COVID-19 di tahun 2022. Penurunan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berperspektif sosial dan adil (Mahler et al., 2022).



Sumber: Data diolah, BPS (2024)

Gambar 1. Perbandingan IPM dan TPT di Pulau Jawa

Berdasarkan Gambar 1, secara rata-rata mulai tahun 2020-2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tiap provinsi senantiasa mengalami kenaikan. Sejalan dengan peningkatan IPM tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi sebuah tanda yang positif karena dengan adanya kenaikan IPM diikuti dengan penurunan TPT dapat diartikan kebijakan pembangunan pemerintah telah berhasil dilaksanakan. Namun demikian, dapat diketahui bahwa masih terdapat *gap* yang cukup signifikan pada 6 provinsi di Pulau Jawa tersebut. Masih terdapat ketidaksetaraan IPM dan TPT, dimana pada tahun 2022 DKI Jakarta mempunyai nilai IPM tertinggi sebesar 81,7% sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai nilai IPM terendah yaitu sebesar 72,8%. Pada indikator TPT Tahun 2022, DI Yogyakarta menjadi provinsi yang paling baik karena mempunyai persentase TPT terendah sebesar 4,06% sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling kurang karena mempunyai persentase tertinggi sebesar 8,31%.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya jumlah pengangguran yang bertambah, distribusi upah minimum yang tidak merata dalam setiap daerah dan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar sehingga menyebabkan kualitas hidup masyarakat yang rendah (Prayoga et al., 2021). Adanya kemiskinan membuat dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi karena kesejahteraan sosial belum sepenuhnya merata untuk diwujudkan di suatu daerah tersebut (Todaro & Smith, 2011). Dalam menciptakan pembangunan

ekonomi yang inklusif, dibutuhkan adanya peran aktif dari pemerintah dalam memberikan jawaban untuk melawan kemiskinan, salah satunya dengan melihat bagaimana pengaruh faktor-faktor penyebab yang berdampak signifikan pada masalah kemiskinan di suatu daerah untuk mengurangi adanya jebakan lingkaran kemiskinan yang secara terus-menerus terjadi di suatu pembangunan negara.

Beberapa komponen dalam determinan permasalahan kemiskinan memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan memiliki perbedaan pengaruh. Terdapat pengaruh negatif antara TPT dengan kemiskinan dimana memberikan arti bahwa adanya peningkatan pengangguran akan mengurangi kemiskinan dan sebaliknya (Ayu, 2018). Namun temuan lain juga memberikan hasil bahwa TPT memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan dimana semakin tinggi pengangguran akan meningkatkan kemiskinan (Praja et al., 2023). Temuan lain terkait komponen lain juga menunjukkan bahwa adanya kenaikan UMK memberikan peningkatan kemiskinan (Ningrum, 2017) dan dapat berpengaruh sebaliknya dimana kenaikan UMK memberikan penurunan kemiskinan (Ashari & Athoillah, 2023).

Selain itu, komponen mengenai pembangunan manusia juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. IPM yang meningkat akan menaikkan persentase kemiskinan (Dharmmayukti et al., 2021) dan sebaliknya, apabila IPM yang menurun akan menaikkan persentase kemiskinan (Ashari & Athoillah, 2023). Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan temuan hasil yang signifikan terhadap kemiskinan di lingkungan masyarakat sehingga muncul sebuah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2022 melalui adanya pengangguran, upah minimum dan pembangunan manusia.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah kemiskinan di suatu masyarakat. TPT dihitung sebagai persentase pengangguran dalam angkatan kerja secara keseluruhan. Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas dan mempunyai pekerjaan namun menganggur atau menganggur sementara, persentase tersebut berasal dari jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan, lapangan kerja, jumlah orang yang mencari pekerjaan, jumlah orang yang mempersiapkan usahanya, jumlah orang yang kecil kemungkinannya mendapatkan pekerjaan, dan jumlah orang yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2024). TPT menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia karena penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar karena tidak mempunyai pekerjaan yang menunjang hidup (Ayu, 2018).

### **Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjelaskan tentang hak pekerja/buruh yang diterima dan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik usaha atau pengusaha kepada pekerja/buruh. Hak-hak tersebut ditentukan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Penghasilan pekerja mencakup pembayaran atas pekerjaan yang diselesaikan atau jasa yang diberikan di masa depan, undangan, dan imbalan bagi karyawan dan keluarganya (Mankiw, 2006). Dengan adanya batasan tertentu, upah minimum dibagi menjadi upah minimum kabupaten/kota dan provinsi. Upah bulanan terendah, yang ditetapkan berdasarkan perubahan tahunan dan mempertimbangkan situasi ketenagakerjaan dan ekonomi, berfungsi sebagai batas atas penghasilan yang disebut upah minimum (Putro, 2010).

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut kutipan dari *website* BPS (2024), IPM menggambarkan bagaimana masyarakat dapat mencapai hasil pembangunan dalam hal memperoleh pendapatan, sehat, mendapat pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur oleh IPM dapat menjadi penentu signifikan dalam mengatasi kemiskinan (Dharmmayukti et al., 2021). Pendidikan dan kesehatan, sebagai dua komponen utama dalam IPM, memberikan kontribusi besar terhadap kapasitas individu untuk mengatasi kemiskinan (Chairunnisa & Qintharah, 2022). Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang ditentukan oleh pendapatan juga direpresentasikan dalam IPM (Ashari & Athoillah, 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, umur panjang, kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang wajar merupakan pilar fundamental yang mendasari pembangunan IPM secara holistik. IPM berguna dalam proses mengkategorikan suatu bangsa dan mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap standar hidup (Suryaningtyas, 2021).

H1 : Pengaruh positif antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan**

TPT memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Ashari & Athoillah, 2023). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya, selain kekurangan uang. Tingkat pengangguran yang tinggi menciptakan kesulitan dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan sumber pendapatan, hal ini menjadi faktor utama dalam kemiskinan. Faktor lain yang berkontribusi adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang dapat memicu peningkatan jumlah pengangguran. Masyarakat yang mengalami kekurangan pekerjaan akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga menimbulkan kemiskinan yang merajalela (Praja et al., 2023). Dampak lebih lanjut terasa melalui peningkatan ketidaksetaraan sosial, dimana sebagian besar masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adanya peningkatan pengangguran yang terjadi akan memberikan dampak yang semakin besar pada ketimpangan sosial di masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (Batubara et al., 2023). Pengembangan hipotesis

ini juga diperkuat oleh temuan penelitian terdahulu dimana pengangguran terbuka mengakibatkan adanya ketimpangan bidang ekonomi dan sosial yang dapat memberikan efek pada pembangunan sehingga tercipta kemiskinan (Ningrum, 2017).

H2 : Pengaruh Negatif antara Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan

### **Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan**

Pengaruh UMK terhadap kemiskinan adalah negatif dan besar. Masyarakat dapat mengatasi hambatan finansial jika menerima upah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhannya. Pekerja yang sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan, upah yang rendah akan berpotensi menjadi pemicu kemiskinan (Ashari & Athoillah, 2023). Sebaliknya, peningkatan UMK dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap kehidupan yang layak dan memungkinkan pekerja untuk terbebas dari jerat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan UMK dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dalam masyarakat dan sebaliknya sehingga masyarakat dapat mewujudkan keinginannya (Hanifah & Hanifa, 2021). Namun, masyarakat akan mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya apabila UMK mengalami penurunan maka dapat diperoleh simpulan bahwa UMK mempunyai peranan penting dalam mengurangi kemiskinan. Adanya upah yang meningkat akan menyejahterakan masyarakat dengan memperbaiki kualitas hidupnya sehingga kemiskinan dapat diberantas dengan signifikan (Febrianica & Pratomo, 2015).

H3 : Pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan**

IPM memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan IPM maka akan menimbulkan penurunan kemiskinan secara signifikan dan apabila terjadi penurunan IPM maka akan menimbulkan kenaikan kemiskinan secara signifikan (Ashari & Athoillah, 2023). Selain itu, IPM telah menjadi landasan masyarakat dalam mendapatkan sarana, prasarana dan fasilitas dalam pembangunan sumber daya manusia (Ningrum, 2017). Kualitas hidup masyarakat yang meningkat akan membuat IPM juga meningkat sehingga dapat menstimulus pembangunan ekonomi. Semakin besar adanya peningkatan IPM, maka akan memberikan peningkatan aspek dalam perekonomian melalui produktivitas sehingga dapat mengurangi adanya kemiskinan dan menciptakan penghidupan masyarakat yang berkualitas (Batubara et al., 2023). Pengembangan hipotesis ini diperkuat oleh temuan penelitian terdahulu dimana adanya program bantuan dari pemerintah turut memberikan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk masyarakat sehingga kemiskinan dapat berkurang (Prayoga et al., 2021).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan teknik analisis *Ordinary Least Square* (OLS), yang melibatkan pendekatan metode penelitian kuantitatif statistik deskriptif secara progresif dan melakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan model BLUE.

Data yang digunakan merupakan data *cross-sectional* dari 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada tahun 2022 sebagai periode dimana perekonomian Indonesia mulai bangkit pasca COVID-19 (Boediono, 2022). Data penelitian bersifat sekunder diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa rincian detail data yang digunakan adalah data kemiskinan berdasarkan dengan data persentase penduduk yang memiliki kategori di bawah Garis Kemiskinan (HCI-P0), data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan dengan data besaran persentase tingkat pengangguran terbuka, data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK berdasarkan rata-rata besaran upah bulanan yang didapatkan oleh pekerja/buruh dalam satuan rupiah (Rp) dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan persentase yang diperoleh dari perubahan pertumbuhan IPM dengan periode sebelumnya dalam satuan persentase (%).

Untuk menggambarkan hubungan antara kemiskinan sebagai variabel terikat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai variabel bebas. Maka hubungan variabel tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = f(\text{TPT}, \text{UMK}, \text{IPM})$$

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda melalui teknik *Ordinary Least Square* (OLS) yang digunakan untuk menentukan pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Metode ini digunakan untuk mencari garis regresi terbaik yang dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan variabel dengan menggunakan teknik kuadrat terkecil. Selanjutnya, dilakukan adanya transformasi logaritma untuk mengurangi dan menciptakan data senormal mungkin sehingga hasil analisis statistik dari data penelitian ini menjadi lebih valid. Metode yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah berupa metode log-log linearitas sebagai berikut: (Porter & Gujarati, 2009)

***log(Kemiskinan)***

$$= C(0) + C(1) * \log(\text{TPT}) + C(2) * \log(\text{UMK}) + C(3) * \log(\text{IPM})$$

Keterangan :  $\log(\text{Kemiskinan})$  : Laju Kemiskinan

$C_0$  : Konstanta

$C_1, C_2, C_3$  : Koefisien

$\log(\text{TPT})$  : Laju Tingkat Pengangguran Terbuka

$\log(\text{UMK})$  : Laju Upah Minimum Kabupaten/Kota

$\log(\text{IPM})$  : Laju Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka mewujudkan model menjadi BLUE, beberapa Uji Asumsi Klasik yang dilakukan meliputi Uji Normalitas Data, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Selanjutnya apabila dalam uji asumsi klasik model mengalami pelanggaran, maka akan dilakukan *treatment* berupa perbaikan model tergantung jenis uji yang dilanggar. Apabila model telah lolos seluruh uji asumsi klasik tersebut, maka akan dilakukan Uji F dan Uji T untuk mengecek hubungan serta signifikansi hasil penelitian dengan hipotesis yang sebelumnya telah diajukan. Selanjutnya akan disajikan juga nilai *R-Squared* yang dihasilkan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil penelitian

Tabel 1 ini menyajikan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Kemiskinan	IPM	TPT	UMK
Mean	9,557034	73,74297	6,144661	2670342
Median	9,325	72,975	5,985	2155092
Maximum	21,61	87,69	10,78	4816921
Minimum	2,5	63,39	1,36	1819835
Std. Dev.	3,807746	5,320666	2,277066	947939,4

Kemudian, didapatkan juga hasil estimasi analisis regresi dan uji asumsi klasik sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik pada Model Penelitian

Variabel	Teori	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob (1 tailed)	Keputusan
Konstanta		23,466	1,783	13,159	0,000	
LOG(TPT)	+	-0,101	0,067	-1,514	0,066	Tidak signifikan
LOG(UMK)	-	-0,470	0,098	-4,789	0,000	Signifikan positif
LOG(IPM)	-	-3,299	0,373	-8,840	0,000	Signifikan positif
Goodness of Fit						
R-squared			0,620			
Adjusted R-squared			0,610			
F-statistic			4,639			
Prob(F-statistic)			0,038			
Multikolinearitas			LOG(TPT) = 1,436214			Tidak ada masalah
			LOG(UMK) = 1,562010			
			LOG(IPM) = 1,136475			
Heteroskedastisitas			Prob. 0,0817 > 0,05			Tidak ada masalah
Normalitas			Prob 0,982743 > 0,05			Berdistribusi Normal

Model dalam bentuk logaritma ini dianggap BLUE karena telah lulus setiap uji asumsi klasik. Hipotesis yang dikemukakan sebelumnya selanjutnya akan diuji untuk melihat apakah sesuai dengan hasil pengujian menggunakan koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Hasil pengujian menghasilkan persamaan regresi berikut:

$$\text{LOG}(\text{Kemiskinan})$$

$$= 23,466 - 3,299 * \text{LOG}(\text{IPM}) - 0,101 * \text{LOG}(\text{TPT}) - 0,470 * \text{LOG}(\text{UMK})$$

Berdasarkan hasil estimasi, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05. Dengan demikian, pada tahun 2022 ditetapkan bahwa kemiskinan di 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dipengaruhi secara signifikan oleh paling tidak satu atau lebih dari variabel bebas yaitu IPM, UMK, dan TPT. Sedangkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,610033 yang ditampilkan oleh Koefisien determinasi memiliki arti bahwa kemampuan variasi dari seluruh variabel bebas dalam



menjelaskan perilaku dari variabel terikat yakni kemiskinan adalah sebesar 61% dan 39% dipengaruhi oleh variasi variabel lain diluar model ini. Variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi (Hanifah & Hanifa, 2021), jumlah penduduk (Ayu, 2018), investasi (Sutikno et al., 2019), dan jumlah angkatan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas (Daniel et al., 2021) .

## **4.2. Pembahasan**

### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan**

Temuan analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara TPT dengan kemiskinan di Pulau Jawa. Hasil ini bertentangan dengan hipotesa yang diajukan dimana hipotesa menunjukkan bahwa TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Adanya pengaruh negatif dalam temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi ini disebabkan oleh adanya pengangguran yang terjadi di Pulau Jawa tidak menyebabkan adanya kemiskinan. Pengangguran di Pulau Jawa masih banyak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan informal yang didapatkan secara fisik atau memanfaatkan media sosial di era digital untuk mendapatkan penghasilannya, orang dengan pekerjaan yang jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, orang yang berusaha atau mempersiapkan usahanya sendiri, orang yang memiliki pekerjaan paruh waktu, atau semua golongan yang tidak termasuk dalam kategori pengangguran terbuka (Akbar & Arifin, 2023).

Selain itu, para pengangguran di Pulau Jawa tidak serta merta menjadi miskin karena anggota keluarga yang lain mampu mencukupi kebutuhannya dan menghidupi keluarga di atas ambang kemiskinan (Ayu, 2018). Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Leonita & Sari, 2019) dan (Lestari & Imaningsih, 2022) dimana memberikan simpulan bahwa masyarakat yang menganggur masih memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu dimana pengaruh TPT negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan akibat adanya pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2022 sudah memiliki kualifikasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui keterampilan dan adaptasinya pada saat mengalami krisis ekonomi (Hanifah & Hanifa, 2021).

### **Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Kemiskinan**

Didapatkan dari hasil analisis statistik bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesa yang telah diajukan bahwa adanya peningkatan UMK akan mengurangi kemiskinan dan apabila terdapat penurunan UMK akan meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa UMK merupakan hasil atau upah yang didapatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sari, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya untuk menyejahterakan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, apabila UMK yang diperoleh mengalami

peningkatan, maka masyarakat akan mendapatkan tambahan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.

Dalam hal ini, masyarakat mendapatkan peningkatan *Willingness To Pay* (WTP) untuk mendapatkan produk barang/jasa dalam memenuhi kebutuhannya (Hanifah & Hanifa, 2021). Nilai kebutuhan hidup yang layak mempengaruhi adanya upah minimum kabupaten/kota dimana masyarakat mendapatkan upah berdasarkan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah (Oktaviana et al., 2021). Hal ini sesuai dengan teori Nurkse yang menyatakan kemiskinan berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan dimana salah satunya disebabkan adanya rendahnya produktivitas dimana dapat berimplikasi kepada pendapatan/upah yang rendah (Sholihin, 2021). Hasil ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Febrianica & Pratomo, 2015), (Pamungkas, 2017), dan (Hermawan, 2019) dimana memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara UMK terhadap kemiskinan dikarenakan UMK merupakan salah satu indikator yang kuat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari upah yang didapatkan.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan**

Berdasarkan hasil analisis data ditunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana apabila terjadi peningkatan IPM maka akan mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa dan apabila terjadi penurunan IPM yang akan menimbulkan peningkatan kemiskinan di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena IPM merupakan suatu indikator yang menjelaskan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yang ada di lingkungannya dan menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas kehidupan masyarakat dalam suatu daerah (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Artinya, pembangunan manusia dapat dicapai apabila pemerintah menyediakan berbagai akses yang bersifat inklusif dan tidak ada pengecualian untuk masyarakat dalam mendapatkannya. Jika masyarakat dapat mudah dalam mengakses pelayanan dasar dari pembangunan nasional yang diberikan oleh pemerintah dengan baik, maka kemiskinan dapat dibasmi sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diwujudkan (Hasibuan, 2023).

Pemerintah berusaha dalam menggunakan anggarannya untuk menciptakan dan meningkatkan fasilitas pelayanan dasar berupa kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lainnya dengan menciptakan berbagai program yang inovatif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat membangun kualitas kehidupan masyarakat (Prayoga et al., 2021). Adanya program yang diberikan oleh pemerintah ini, dapat mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki dampak pada kenaikan produktivitas sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mewujudkan penurunan angka kemiskinan di Pulau Jawa (Suryaningtyas, 2021). Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan penelitian terdahulu dimana perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan untuk mengatasi adanya kemiskinan karena wujud peningkatan pembangunan manusia melalui berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan kunci utama yang

dapat memperluas cakupan dan standar hidup yang layak bagi masyarakat tanpa terkecuali (Andykha et al., 2018).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: hasil penelitian menunjukkan secara parsial pada variabel bebas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Selanjutnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Temua lainnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah dapat mengatasi adanya permasalahan kemiskinan dengan menciptakan kebijakan fiskal untuk memberikan akses-akses yang dapat diperoleh oleh masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, perubahan penetapan UMK yang disesuaikan dengan inflasi dan penciptaan lapangan pekerjaan serta pelatihan keterampilan untuk masyarakat sangat dibutuhkan guna memperbaiki kualitas hidup sehingga kemiskinan dapat teratasi sehingga pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

## Referensi

- Akbar, R. K., & Arifin, Z. (2023). Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2021. *Jurnal Ilmu EKonomi (JIE)*, 7(1), 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.23860>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk. *Journal of Development Economic And Social Studies*, 2(2), 313–326. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>
- Ayu, D. S. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9528>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. <https://www.bps.go.id/>
- Batubara, M., Nazmi, L., & Harahap, M. R. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Masharifal*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19915>

- Boediono, L. (2022). *Perekonomian Indonesia Mengalami Kebangkitan pada Tahun 2022 Setelah Dibuka Kembali Pasca COVID*. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/12/15/indonesia-s-economy-sees-rebound-in-2022-following-post-covid-reopening>
- Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal PETA*, 7(1), 147–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>
- Daniel, P. A., Soleh, A., Kurniawan, H., & Firmansyah, D. (2021). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(1), 40-51.
- Dharmmayukti, B., Rotinsulu, T. O., & Niode, Auide. O. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(05). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20253>
- Febrianica, D. N., & Pratomo, D. S. (2014). Analisis dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Independent : Journal Of Economics*, 1(3), 191–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jp2sh.v8i1.2075>
- Hermawan, A. (2019). Analisis Pengaruh Umk Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6041/5315>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Lestari, I. T., & Imaningsih, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Manajemen*, 14(4), 739–746.
- Mahler, D. G., Yonzan, N., & Lakner, C. (2022). *The Impact of COVID-19 on Global Inequality and Poverty*. <http://www.worldbank.org/prwp>.
- Mankiw, N. G. (2006). The macroeconomist as scientist and engineer. *Journal of economic perspectives*, 20(4), 29-46.
- Megawati, E., & Sebayang, L. K. B. (2018). Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 235-242. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25255>
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>

- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, 3(5), 1034-1049. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1183>
- Pamungkas, P. A. (2017). *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6364>
- Porter, D. C., & Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics*. <https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/8914>
- Praja, R. B., Sihombing, P. R., & Muchtar, M. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Ecoplan*, 6(1), 78-86. <https://www.researchgate.net/publication/371540881>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240. [journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium)
- Prayoga, M. L., Muchtolifah, & Sishadiyanti. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–142. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>,
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>
- Putro, A. S. (2010). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungannya Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121-130.
- Sholihin, M. K. (2021). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *GEMAH RIPAHA: Jurnal Bisnis*, 1(01), 1-7. <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/134/61>
- Suryaningtyas, Y. I. (2021). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2010-2020* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59542>
- Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. Ch., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/22906/22602>

- Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, H., & Aisyah, S. (2021). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i2.136>